



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023



TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Ketua

Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
BPS Kabupaten Badung

Penyunting/Editor

Perencana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Pengolah Data

Tim SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Penata Letak

Perencana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugrahanya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Penyusunan LkjIP Tahun 2023 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat pertanggungjawaban Kinerja Pembangunan di Bidang Pertanian dan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023, yang diukur dengan 4 indikator kinerja utama untuk pencapaian 4 sasaran strategis dengan di dukung 9 Program, 27 Kegiatan serta 49 Sub Kegiatan.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu usul, saran dan masukan dari semua pihak untuk upaya perbaikan sangat kami hargai, namun secara umum masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung selama Tahun 2023 sebagai implementasi dari RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026.

Mangupura, 26 Februari 2024
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung,



Dr. I Wayan Wijana S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198812 1 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | I |
| DAFTAR ISI | li |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GRAFIK | iv |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | V |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung | 2 |
| 1.3 Ruang Lingkup | 6 |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 7 |
| 2.1 Rencana Strategis | 7 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama | 12 |
| 2.3 Rencana Kerja | 13 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja | 20 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 23 |
| 3.1 Pengukuran Kinerja | 23 |
| 3.2 Analisis Capaian Kinerja | 24 |
| 3.3 Aspek Keuangan | 44 |
| 3.4 Prestasi yang diraih | 52 |
| BAB IV. PENUTUP | 53 |
| 4.1 Kesimpulan | 53 |
| 4.2 Rekomendasi | 55 |
| 4.3 Program Inovasi..... | 56 |

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|-------------|---|---------|
| Tabel 2.1 | Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023 | 12 |
| Tabel 2.2 | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023 | 13 |
| Tabel 2.3 | Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023..... | 21 |
| Tabel 3.1 | Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023 | 24 |
| Tabel 3.2.1 | Capaian Peningkatan Produksi Strategis dalam negeri Tahun 2021, Tahun 2022 | 25 |
| Tabel 3.3.1 | Analisa Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Makanan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2023 | 39 |

DAFTAR GRAFIK

| | | Halaman |
|-----------|--|---------|
| Grafik 1. | Capaian Kinerja Tahun 2023..... | VI |
| Grafik 2. | Produksi Kumulatif Pangan Strategis..... | 27 |
| Grafik 3. | Produksi Kumulatif Pangan Strategis..... | 27 |
| Grafik 4. | Indeks Pertanaman..... | 35 |

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah selama kurun waktu satu tahun anggaran. LkjIP disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini, dijelaskan pula pertanggungjawaban pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung tahun 2021-2026 sebagai implementasi dari pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana tahun 2021 – 2026.

RINGKASAN EKSEKUTIF

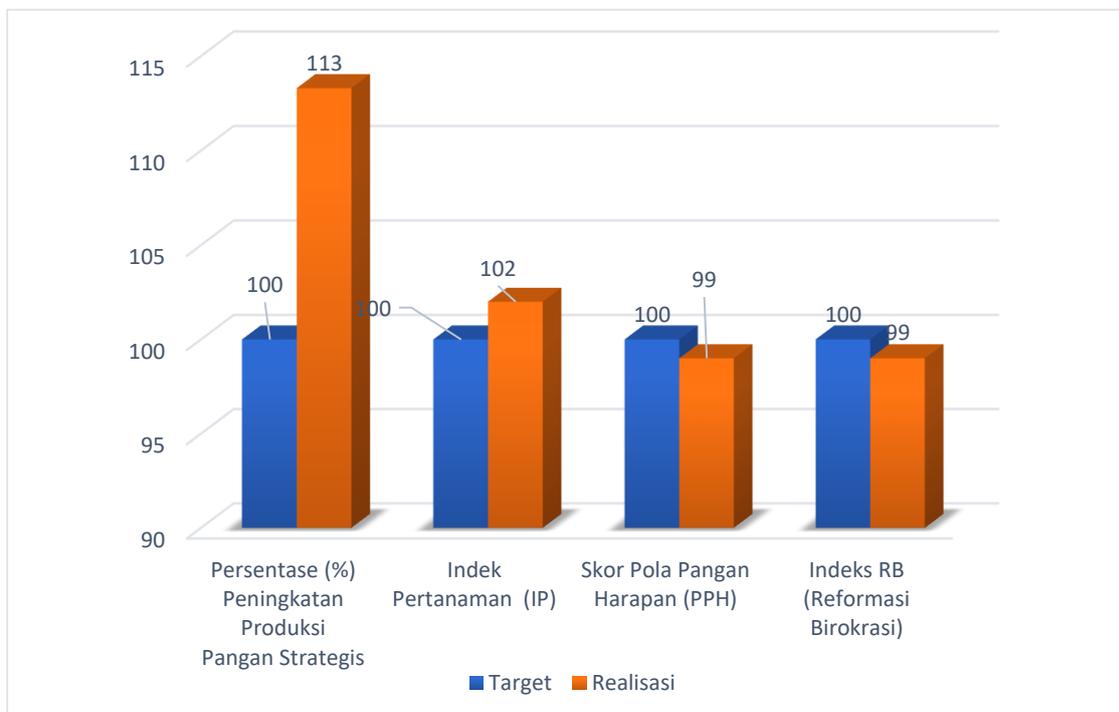


Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam kapasitasnya sebagai pelaksana teknis membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertanian dan pangan dituntut mampu memberikan kontribusi atas pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Target Kinerja dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026, serta ikut bertanggungjawab mewujudkan Misi 8 yaitu Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.

Secara umum capaian kinerja kinerja RJMD sudah tercapai sesuai terget sehingga sudah dilakukan revisi target. Begitu pula capaian kinerja atas sasaran dan target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan menunjukkan kinerja yang baik. Dari 4 (Empat) Sasaran dan 4 (empat) indikator dengan capaian kinerja tahun 2023 rata-rata 103,88% , dan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapai 100% yakni karena perubahan cuaca yang ekstrem serta perbaikan saluran irigasi sangat berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja yang ditetapkan, alih fungsi lahan, ketersediaan air dan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

Secara ringkas capaian kinerja tahun 2023 masing-masing indikator seperti diagram berikut :

CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN 2023



Berdasarkan kategori capaian kinerja tersebut diatas, 4 (empat) indikator dalam kategori tinggi . Adapun alokasi anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 88.073.810.157,-.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dan efektivitas program/kegiatan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga bisa dilakukan antisipasi apabila terjadi perubahan cuaca yang ekstrem maupun perbaikan saluran irigasi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman.
2. Melakukan penyempurnaan terhadap pohon kinerja sehingga dapat dirumuskan sasaran kinerja yang seharusnya dicapai dan didukung dengan program/kegiatan yang benar-benar dapat mencapai output dan outcome yang mendukung pencapaian target kinerja.
3. Menjalni kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan luas tanam, produksi dan memperluas akses pemasaran.

Melaksanakan program inovasi untuk meningkatkan pelayanan melalui program Badung Go Tani, Matanabe, Mangupura Vet Care, pembangunan Display Kopi dan melaksanakan pasar Mini Tani.

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan hal ini diperlukan karena aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya.

BAB I PENDAHULUAN

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan tersebut, maka pengukuran terhadap kinerja sangat penting untuk dilakukan. Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan adanya indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Berpijak pada konsep tersebut, maka indikator kinerja tidak saja dari aspek inputs, outputs, tapi juga sampai pada out comes, benefits dan impact dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada gilirannya semua proses yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian dan pangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian dan pangan;

4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang pertanian dan pangan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

- a. Sub Bagian Umum Dan Keuangan
- b. Analis Kepegawaian Ahli Muda
- c. Perencana Ahli Muda

3. Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian

- a. Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda
- b. Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Muda
- c. Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda

4. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- c. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda

5. Bidang Perkebunan

- a. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
- b. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda

6. Bidang Peternakan

- a. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
- b. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
- c. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda

7. Bidang Kesehatan Hewan

- a. Medik Veteriner Ahli Muda
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian

8. Bidang Pangan Dan Penyuluhan

- a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- c. Analis Kebijakan

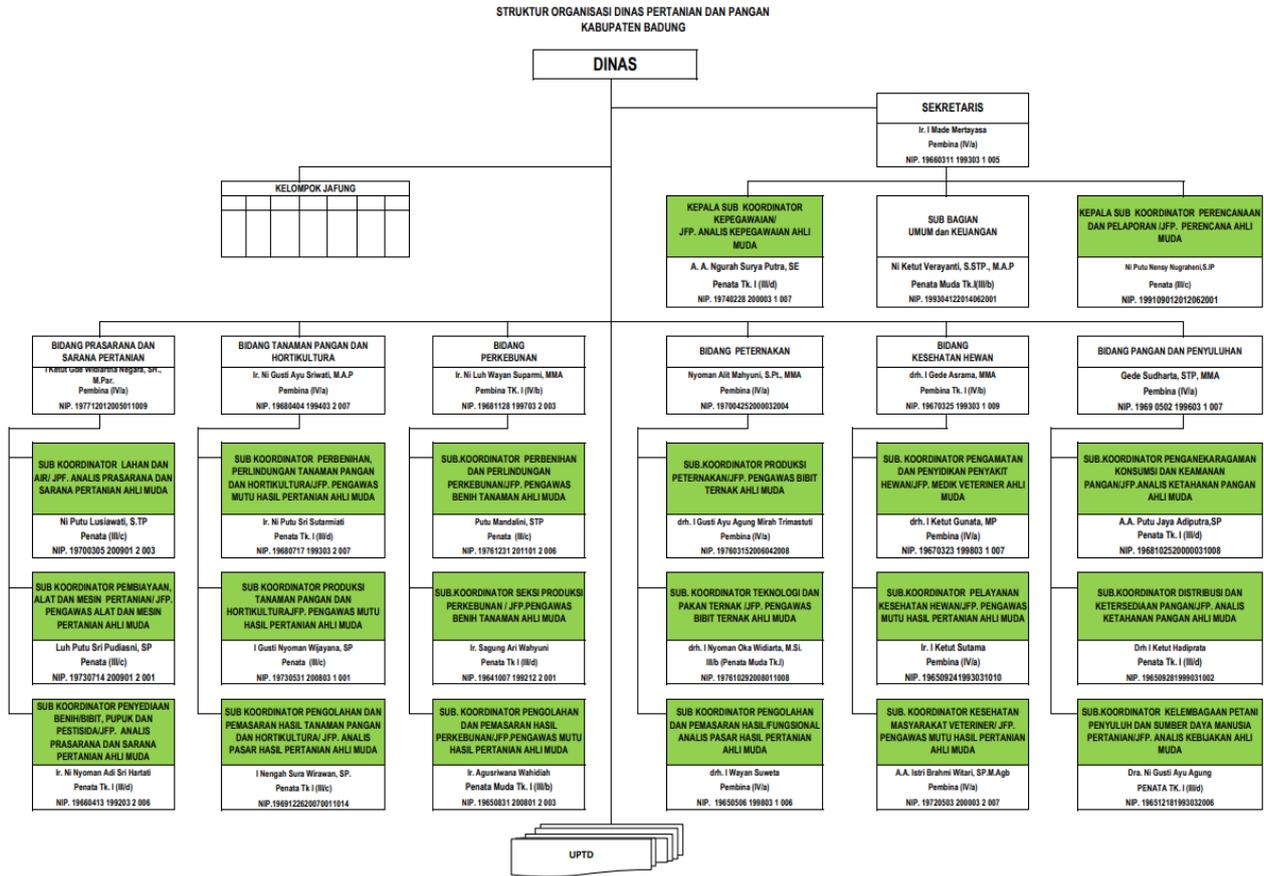
9. Unit Pelaksana Teknis Di 6 Kecamatan

- a. Kepala Uptd Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian
- b. Kepala Uptd Balai Benih Utama Padi, Palawija Dan Hortikultura
- c. Kepala Uptd Pusat Kesehatan Hewan Mengwi
- d. Kepala Uptd Pusat Kesehatan Hewan Petang
- e. Kepala Uptd Rumah Potong Hewan
- f. Kepala Uptd Pembibitan Tanaman Pertanian, Perkebunan, Hortikultura dan Arboretum

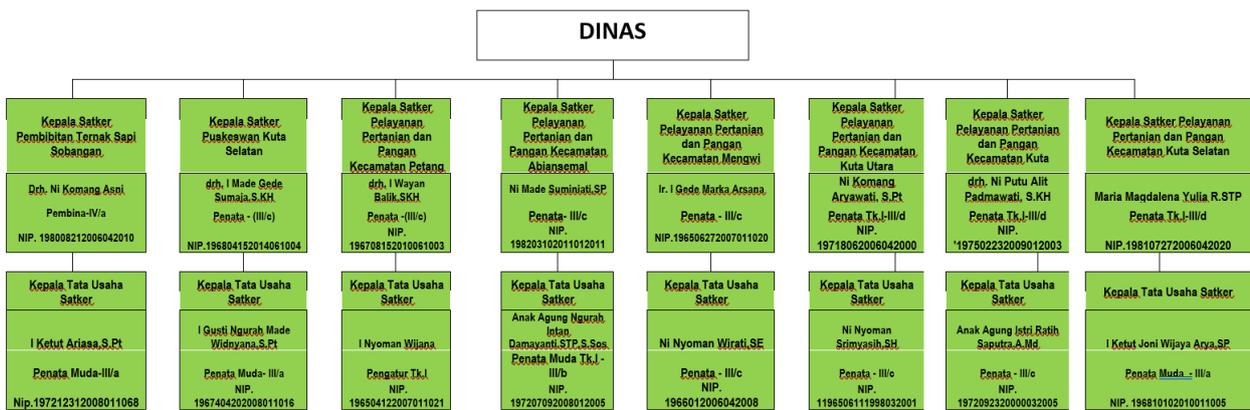
10. Satuan Kerja (SATKER)

- a. Satker Pembibitan Ternak Sapi Sobangan
- b. Satker Puskesmas Kuta Selatan
- c. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Petang
- d. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Abiansemal
- e. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Mengwi
- f. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta Utara
- g. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta
- h. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta Selatan

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan KabupatenBadung dapat dilihat dalam gambar berikut :



SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja ini, pada dasarnya berupaya untuk menjawab sasaran RPJMD kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Petanian dan Pangan Kabupaten Badung. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, maka setiap perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sesuai instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu, perlu pula memperhatikan:

- Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yaitu hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing SKPD serta memuat baik keberhasilan maupun kegagalan.
- Prinsip Prioritas, yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban SKPD yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.
- Prinsip Manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biayapenyusunannya dan bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

LKjIP mencerminkan kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran yang berbasis kinerja artinya pelaksanaan kegiatannya terukur, teruji dengan sasaran yang jelas.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sesuai Visi dan Misi Bupati Badung dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, maka pada Tahun Anggaran 2023 terdapat 4 Sasaran 4 indikator Kinerja yang ingin dicapai, dengan dukungan 9 Program, 27 Kegiatan serta 49 Sub Kegiatan dan telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) 2023.

2.1.RENCANA STRATEGIS

Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali Program pembangunan bidang pertanian dan pangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sudah semestinya seiring, sejalan dan bersinergi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah dicanangkan baik dalam skala daerah maupun dalam skala nasional, dimana dalam implementasi/ pelaksanaannya harus bersinergi dan terintegrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Keberhasilan program pemerintah daerah adalah cerminan dari keberhasilan program pemerintah pusat.

Seirama dengan rencana strategis kementerian terkait, rencana strategis perangkat daerah 5 tahun ke depan bila ditarik benang merahnya, dapat dilihat dari visi dan misi renstra yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap kementerian dan provinsi sebagai berikut telaahan Renstra Kementerian Pertanian:

Visi Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024 :

”Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020– 2024, Misi yang ditetapkan ada 3 yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.



Sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi tersebut adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Selain mendukung program strategis nasional, Dinas Pertanian dan Pangan juga mendukung program strategis sektoral yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali. Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Tahun 2018- 2023 adalah

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam mewujudkan Bali era baru”

Adapun Misi yang diemban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali adalah :

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas memadai bagi kehidupan krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani.



Strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi tersebut adalah: Mempercepat peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani. Arah Kebijakan yang dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatkan produksi pangan pokok
2. Meningkatkan produksi dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3. Meningkatkan kapasitas SDM Pertanian Krama Bali
4. Meningkatkan Produktivitas Ternak
5. Meningkatkan kesehatan hewan secara berkelanjutan
6. Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung berusaha menyelaraskan Misi dan Sasaran yang dibuat oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bali meskipun dengan nomenklatur bahasa yang berbeda tetapi arti yang sama disesuaikan dengan target pencapaian Visi dan Misi Bapak Bupati – Wakil Bupati Badung terpilih Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian tujuan melalui perbaikan sistematis dan kebijakan di bidang pertanian dan pangan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pembangunan Bidang Pertanian dan Pangan di Kabupaten Badung yang diselaraskan dengan arah pembangunan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maupun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 2021-2026 digunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dalam pencapaian visi dan misi Bupati Badung serta tujuan organisasi. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung selalu memperhatikan keseimbangan pembangunan yang ada di Badung Selatan, Badung Tengah dan Badung Utara, sebagai satu kesatuan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik dan pemerintahan sehingga terwujud pembangunan yang terencana dan berkelanjutan dengan dilandasi falsafah *”Tri Hita Karana”*, khususnya dalam sub sektor Pertanian dan Pangan.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, maka sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 ,ditetapkan Visi Kabupaten Badung yaitu:

“MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA ”



Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas serta memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan 9 Misi (Misi 2021-2026) Kabupaten Badung. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam mewujudkan visi Kabupaten Badung mengacu dan mendukung **misi 8, yaitu :**

“Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam”

Mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang telah ditetapkan serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan Tujuan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Tujuan.

Adapun Tujuan dari Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat”

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. Sasaran juga memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, teruji, dapat diukur dan dapat dicapai serta saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Pangan periode tahun 2016 – 2023 adalah sebanyak 4 (empat) Sasaran, yaitu :

- 1 Meningkatkan Produksi Pangan Strategis
- 2 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
- 3 Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan
- 4 Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian

Adapun korelasi antara tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

| Tujuan: | Sasaran : |
|---|---|
| Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat | <p>Meningkatnya Produksi Pangan Strategis</p> <p>Optimalisasi Pemanfaatan Lahan</p> <p>Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan</p> <p>Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian</p> |

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | |
|----|---|---|-------|
| 1. | Meningkatnya Produksi Pangan Strategis | a. Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis | 0,15% |
| 2. | Optimalisasi Pemanfaatan Lahan | a. Indek Pertanaman (IP) | 2,082 |
| 3. | Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan | a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 95,98 |
| 4. | Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian | a. Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | 24,96 |

2.3. RENCANA KINERJA

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 2023 melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian. Besaran anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp.88.073.810.157 yang terdiri dari :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan : Rp. 7.668.608.513
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian : Rp. 80.405.201.644

Adapun rinciannya Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sebagai berikut :

| KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG | INDIKATOR | TARGET | PAGU |
|------|----|----|------|----|---|--|--------------|----------------------|
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | 7.668.608.513 |
| 2 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 100 % | 7.633.473.054 |
| 2 | 09 | 03 | 2,01 | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Produksi Beras | 50627.16 Ton | 4.604.412.344 |
| 2 | 09 | 03 | 2,01 | 01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 1 Laporan | 1.207.227.650 |
| 2 | 09 | 03 | 2,01 | 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | 3 Laporan | 3.397.184.694 |
| 2 | 09 | 03 | 2,02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase Cadangan Pangan yang dikelola dengan baik | 100 % | 1.708.000.000 |
| 2 | 09 | 03 | 2,02 | 03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 15 Ton | 1.708.000.000 |
| 2 | 09 | 03 | 2,04 | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun | 7 Kelompok | 1.321.060.710 |

| | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--------------|----------------|
| 2 | 09 | 03 | 2,04 | 02 | Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 3 Laporan | |
| 2 | 09 | 04 | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase (%) Desa Tahan Pangan | 93 % | 11.371.075 |
| 2 | 09 | 04 | 2,01 | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan | 15 Dokumen | 5.815.590 |
| 2 | 09 | 04 | 2,01 | 01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan | 1 Dokumen | 5.815.590 |
| 2 | 09 | 04 | 2,02 | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan | 1 Laporan | 5.555.485 |
| 2 | 09 | 04 | 2,02 | 02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 5.555.485 |
| 2 | 09 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT) | 4 Komoditi | 23.764.384 |
| 2 | 09 | 05 | 2,01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | 3 Kelompok | 23.764.384 |
| 2 | 09 | 05 | 2,01 | 02 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Sertifikat | 15.606.720 |
| 2 | 09 | 05 | 2,01 | 03 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 23.253.000 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | |
| 3 | 27 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LKjIP | 84,55 0 | 46.612.089.262 |
| 3 | 27 | 01 | 2,01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersusun tepat waktu | 7 Dokumen | 13.544.200 |
| 3 | 27 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 6.292.383 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|-----------------|-----------------------|
| 3 | 27 | 01 | 2,01 | 07 | | | 4 Laporan | 7.251.817 |
| 3 | 27 | 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu</i> | 2240 O/B | 39.126.078.857 |
| 3 | 27 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pertanian dan Pangan) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2240 O/B | 39.126.078.857 |
| 3 | 27 | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu</i> | 100% | 8.074.254 |
| 3 | 27 | 01 | 2,05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Pertanian dan Pangan) | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 Dokumen | 5.856.918 |
| 3 | 27 | 01 | 2,05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pertanian dan Pangan) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 2.217.336 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu</i> | 41 Paket | 966.835.101 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pertanian dan Pangan) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 13 Paket | 24.500.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pertanian dan Pangan) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 95.435.794 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pertanian dan Pangan) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 13 Paket | 34.171.273 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 13 Paket | 724.265.947 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 21.442.087 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|---|--|------------|----------------------|
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 06 | Peralatan Perundang-undangan | Dokumen dan Peralatan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 67.020.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.589.636.386 |
| 3 | 27 | 01 | 2,07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 291.930.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 54 Unit | 2.510.753.379 |
| 3 | 27 | 01 | 2,07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 786.953.007 |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu | 36 Laporan | 1.489.189.791 |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12.000.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 604.913.679 |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 872.276.112 |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik | 586 Unit | 1.418.730.673 |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 161 Unit | 1.175.353.941 |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 411 Unit | 118.996.732 |

| | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 09 | | Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit | 124.380.000 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor) | 133648.2 Ton | 18.309.211.929 |
| 3 | 27 | 02 | 2,01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis) | 127 Kelomp | 13.369.337.493 |
| 3 | 27 | 02 | 2,01 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 3 Laporan | 9.421.019.605 |
| 3 | 27 | 02 | 2,01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 8 Laporan | 3.948.317.888 |
| 3 | 27 | 02 | 2,02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi) | 0,4 % | 460.359.942 |
| 3 | 27 | 02 | 2,02 | 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 3 Dokumen | 407.007.189 |
| 3 | 27 | 02 | 2,02 | 03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | 53.352.753 |
| 3 | 27 | 02 | 2,03 | | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu | 25 Sampel | 32.158.591 |
| 3 | 27 | 02 | 2,03 | 02 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | 1 Laporan | 32.158.591 |
| 3 | 27 | 02 | 2,04 | | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi | 7 Pengecer obat Hewan | 1.355.529 |
| 3 | 27 | 02 | 2,04 | 01 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | 1 Laporan | 1.355.529 |

| | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|-------------|----------------------|
| 3 | 27 | 02 | 2,05 | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan | 9 Kelompok | 15.809.337 |
| 3 | 27 | 02 | 2,05 | 06 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | 12 Laporan | 15.809.337 |
| 3 | 27 | 02 | 2,06 | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas | 400 Ekor | 4.430.191.037 |
| 3 | 27 | 02 | 2,06 | 01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 162 Ekor | 4.430.191.037 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Luas Tanam Padi | 20739.85 Ha | 6.919.240.210 |
| 3 | 27 | 03 | 2,01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian | 1 Dokumen | 86.581.446 |
| 3 | 27 | 03 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 1 Laporan | 86.581.446 |
| 3 | 27 | 03 | 2,02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun | 7 Unit | 3.482.144.699 |
| 3 | 27 | 03 | 2,02 | 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 4 Unit | 3.482.144.699 |
| 3 | 27 | 03 | 2,03 | | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah sumber bibit Ternak yang dikelola dengan baik | 1 Wilayah | 3.350.514.065 |
| 3 | 27 | 03 | 2,03 | 01 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | 1 Laporan | 3.350.514.065 |
| 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan | 100 % | 4.691.787.269 |

| | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|------------|----------------------|
| 3 | 27 | 04 | 2,01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan | 13 Laporan | 4.113.895.962 |
| 3 | 27 | 04 | 2,01 | 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 13 Laporan | 4.113.895.962 |
| 3 | 27 | 04 | 2,03 | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa | 1 Laporan | 346.506.554 |
| 3 | 27 | 04 | 2,03 | 02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | 346.506.554 |
| 3 | 27 | 04 | 2,04 | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi | 62 Lokasi | 231.384.753 |
| 3 | 27 | 04 | 2,04 | 02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 2 Laporan | 44.070.588 |
| 3 | 27 | 04 | 2,04 | 03 | Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis | Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan | 1 Laporan | 122.615.833 |
| 3 | 27 | 04 | 2,04 | 04 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1 Dokumen | 64.698.332 |
| 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | % Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi | 100 % | 1.326.633.037 |
| 3 | 27 | 05 | 2,01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi | 430 Ha | 1.326.633.037 |
| 3 | 27 | 05 | 2,01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 405 Ha | 141.966.653 |
| 3 | 27 | 05 | 2,01 | 03 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 25 Ha | 1.184.666.384 |

| | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|-----------|----------------------|
| 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan | 100 % | 2.546.239.937 |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompk Tani | 8496 Kali | 2.546.239.937 |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 5 Unit | 1.271.805.017 |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 82 Unit | 249.166.684 |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 59 Unit | 1.025.268.236 |

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja direalisasikan dengan Penetapan kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang akan menerima tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggungjawab/kinerja.

Dikarenakan adanya refofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan situasi APBD Badung yang terpengaruh oleh situasi Covid-19, maka Perjanjian kinerja tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mengalami perubahan seperti pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4.
Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | |
|----|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | SEBELUM PERUBAHAN | SESUDAH PERUBAHAN |
| 1. | Meningkatnya Produksi Pangan Strategis | a. Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis | 0,15 % | 0,15 % |
| 2. | Optimalisasi Pemanfaatan Lahan | a. Indek Pertanaman (IP) | 2,082 | 2,082 |
| 3. | Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan | a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 95,98 | 95,98 |
| 4. | Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian | a. Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | 24,96 | 24,96 |

Program kerja oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung pada tahun 2023 dalam rangka memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| | | Induk | Perubahan |
| 1. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Rp. 2.891.455.059 | Rp. 7,633,473,054 |
| 2. | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Rp.10.621.075 | Rp. 11,371,075 |
| 3. | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Rp.29.417.224 | Rp. 23,764,384 |

| | | | |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 4. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 39.126.078.857 | Rp. 46,612,089,262 |
| 5. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp. 14.739.888.405 | Rp. 18,309,211,929 |
| 6. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp. 11.639.110.561 | Rp. 6,919,240,210 |
| 7. | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Rp. 3.232.818.965 | Rp. 4,691,787,269 |
| 8. | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Rp. 439.958.400 | Rp. 1,326,633,037 |
| 9. | Program Penyuluhan Pertanian | Rp. 2.101.727.667 | Rp. 2,546,239,937 |
| | Total | Rp. 43.224.737.269 | Rp. 88.073.810.157 |

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data - data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) Data internal, berasal dari sistem informasi perangkat daerah, dan (2) Data eksternal, berasal dari luar Instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efektivitas dan efisien.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, diperoleh hasil kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dengan rincian seperti pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung Tahun 2023

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | % CAPAIAN |
|-----------|---|--|--------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Meningkatnya Produksi Pangan Strategis | Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis | 0,15 % | 0,17% | 113,3% |
| 2 | Optimalisasi Pemanfaatan Lahan | Indek Pertanaman (IP) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 2,082 | 2,13 | 102,3% |
| 3 | Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 95,98 | 95,97 | 99,99% |
| 4 | Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | 24,96 | 24,94 | 99,91% |

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yang penilaiannya dilakukan secara mandiri oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara realisasi atau kinerja nyata dengan yang direncanakan (target sasaran).

Dalam analisis ini juga akan diuraikan hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan serta langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali

Sesuai misi pertama yang tertuang pada Renstra Kementerian Pertanian Visi Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024 yakni **terwujudnya ketahanan pangan** dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, serta sesuai dengan misi yang tertuang pada Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Tahun 2018- 2023 yakni, **memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas memadai bagi kehidupan krama Bali** memiliki korelasi dengan pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung yang dituangkan dalam perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 pada sasaran 1 yakni **meningkatnya produksi pangan strategis Kabupaten Badung**. Secara garis besar peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2.1

Capaian peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri

| KOMODITI | CAPAIAN TH 2022 | | | CAPAIAN TH 2023 | | | % PENINGKATAN | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| | NASIONAL | BALI | BADUNG | NASIONAL | BALI | BADUNG | NASIONAL | BALI | BADUNG |
| BERAS | 31.356.017 | 349.038 | 59.515 | 32.074.045 | 390.155 | 62.821 | 2,29 | 11,78 | 5,55 |
| KOPI | 786.200 | 15.600 | 702,86 | 794.800 | 15.600 | 617,11 | 1,09 | - | - 12,20 |
| TELOR (Ayam Petelur) | 5.155.997,6 | 191.589,1 | 2.095 | 5.566.339,4 | 176.855,4 | 15.333 | 7,96 | - | 631,89 |
| DAGING AYAM (Pedaging) | 3.185.698,5 | 75.772,7 | 12.633 | 3.765.573,1 | 86.016,5 | 24.807 | 18,20 | 13,52 | 96,37 |
| DAGING SAPI | 487.802,2 | 4.651 | 1.363 | 498.923,1 | 4.694 | 35.684 | 2,28 | 0,93 | 2.518,30 |
| TOTAL | 40.971.715 | 636.651 | 76.309 | 42.699.681 | 673.321 | 139.262 | 4,22 | 5,76 | 82,50 |

Sumber : <https://webapi.bps.go.id/>

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa , Kabupaten Badung berkontribusi terhadap prosentase peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri sebesar 0,32% atau sebanyak 139.262 Ton dari capaian Nasional yakni 42.699.681 Ton. Peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri di Tahun 2023 diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan melaksanakan berbagai strategi seperti penetapan lahan sawah yang dilindungi atau pengendalian alih fungsi lahan sawah, diversifikasi budidaya, menyusun neraca pangan strategis dan serta pemeliharaan jaringan irigasi.

3.2.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

Sasaran 1 : Meningkatnya produksi pangan strategis untuk

mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama : Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | % CAPAIAN |
|----|--|---|-------------|----------------|-----------|
| 1 | Meningkatnya Produksi Pangan strategis | a. Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis | 0,15 % | 0,17% | 113,3% |

Target presentase (%) peningkatan produksi pangan strategis Tahun 2023 adalah 0,15% dan terealisasi sebesar 0,17 % dengan presentase 113,3%. Produksi kumulatif pangan strategis Tahun 2023 adalah sebesar 118.325 Ton. Yang termasuk dalam produksi pangan strategis ialah Beras, Daging dan Telur Sedangkan untuk perbandingan presentase peningkatan produksi pangan kumulatif tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

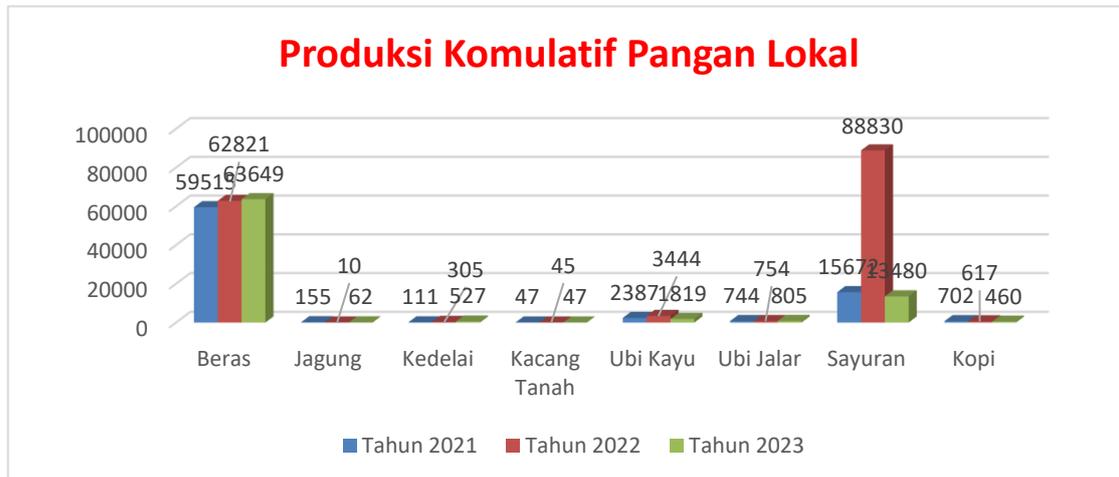
Tabel 3.2.2.1

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

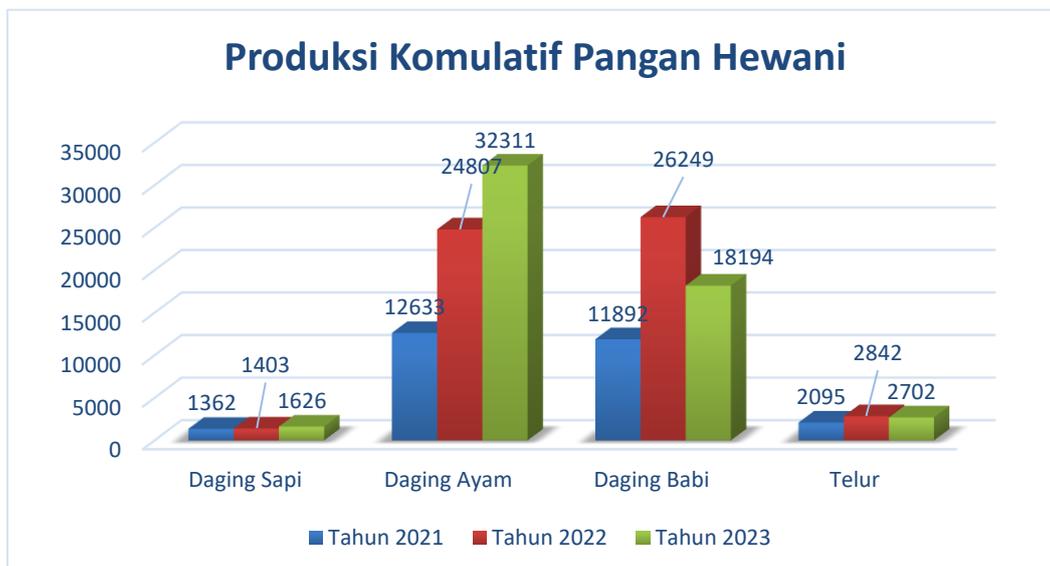
| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
|----|--|---|------------|------------|
| 1 | Meningkatnya Produksi Pangan strategis | a. Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis | 0,16 % | 0,17% |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan produksi pangan strategis di Tahun 2023 mencapai 118.942 Ton. , dimana pada Tahun 2022 produksi pangan strategis (beras,kopi, daging dan telur) mencapai 118.739 Ton.

Rekapitulasi produksi komulatif pangan (tanaman pangan) lokal dapat dilihat pada diagram berikut :



Rekapitulasi produksi komulatif pangan strategis (daging dan telur) dapat dilihat pada diagram berikut :



Terjadi penurunan terhadap produksi pangan strategis khususnya produksi kopi, daging babi dan telur. Terlihat pada diagram diatas bahwa pada Tahun 2022 total produksi kopi sebanyak 617 Ton , daging adalah sebanyak 52.459 Ton dan produksi telur di Kabupaten Badung mencapai 2.842 Ton sedangkan terjadi penurunan jumlah produksi kopi di Tahun 2023 menjadi 460 Ton, daging di Tahun 2023 menjadi 52.131 Ton dan produksi telur menurun menjadi 2.702 Ton.

Penurunan Produksi Pangan Daging dan Telur di Kabupaten Badung disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Terjadinya El nino yang mengakibatkan musim kemarau berkepanjangan sehingga mengganggu musim tanam dan sangat berpengaruh terhadap produksi pangan 2023.
2. Menurunnya kualitas dan debit air
3. Menurunnya tingkat kesuburan tanah yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman
4. Terjadinya kasus penyakit Meningitis Streptococcus Suis yang bersifat menular kepada manusia (zoonosis) sehingga berdampak pada menurunnya konsumsi daging babi
5. Meningkatnya permintaan babi potong dari luar daerah dengan harga yang lebih mahal sehingga menurunnya jumlah pemotongan babi untuk konsumsi lokal
6. Menurunnya produksi telur disebabkan oleh meningkatnya harga bahan baku pakan terutama jagung sehingga terjadi penurunan populasi ayam petelur

Meskipun terdapat permasalahan diatas, tetapi kondisi ketersediaan pangan strategis secara kumulatif di Kabupaten Badung mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena strategi Dinas Pertanian dan Pangan dengan merancang berbagai macam program kegiatan guna mengantisipasi kemungkinan terburuk terhadap perubahan iklim secara global yang terjadi , antara lain :

1. Menghimbau kepada petani untuk mempercepat masa tanam agar dapat memanfaatkan air secara efektif dan efisien.
2. Penerapan pola tanam dengan pergiliran komoditas serta pemilihan varietas benih tanaman yang tidak membutuhkan banyak air dan tahan hama.
3. Melakukan perbaikan dan perawatan jaringan irigasi untuk mencegah terjadinya kebocoran air
4. Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang LP2B dan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
5. Meningkatkan kesuburan tanah melalui upaya pergiliran komoditas, pemanfaatan pupuk organik dan pengadaan pembenah tanah.

6. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan melalui komunikasi informasi dan edukasi (KIE) , memperluas cakupan vaksinasi , meningkatkan pelayanan kepada kelompok ternak
7. Meningkatkan populasi ternak yang berkualitas melalui kegiatan pengadaan bibit ternak dan meningkatkan pelayanan inseminasi buatan
8. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui kegiatan:
 - Demplot Cabai rawit seluas 15 Ha
 - Demplot Bawang merah seluas 2 Ha yang dilaksanakan di Subak Munggu Kecamatan Mengwi dan Subak Tungku Kecamatan Mengwi
 - Demplot Jagung seluas 5 Ha di Subak Penarungan Munduk Umadesa Kecamatan Mengwi
 - Demplot Asparagus seluas 10 Ha di Kelompok Green Asparagus dan Kelompok Tani Bumi Cakra Kembang Kecamatan Petang



Kegiatan demplot ini terus dikembangkan, sejalan dengan program pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya inflasi. Selain itu kegiatan demplot ini memiliki pengaruh besar bagi perkembangan teknologi pertanian di Kabupaten Badung.

Demplot merupakan suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan pengaruh sesuatu terhadap tanaman. Melalui kegiatan demplot, petani dapat langsung melihat dan mempraktikkan inovasi teknologi budidaya, varietas unggul baru, pemupukan dan lain-lain yang dianjurkan sehingga diharapkan menambah pengetahuan, perubahan sikap dan keterampilan petani dalam pelaksanaan budidaya yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas.

9. Pelaksanaan Gertam (Gerakan Tanam) Bawang Merah di Subak Munggu Desa Munggu Kecamatan Mengwi. Gerakan tanam ini merupakan program jangka pendek dan menengah dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam upaya pengendalian mitigasi dampak inflasi.



10. Adanya pelaksanaan kegiatan demplot tanaman perkebunan seperti:

- Demplot vanili seluas 5 Ha di Sulangai Kecamatan Petang
- Demplot Kakao di Desa Pangsan dan Desa Petang Kecamatan Petang

11. Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Pembentukan Unit Reaksi Cepat

Mengingat dampak buruk organisme pengganggu tumbuhan tidak hanya berdampak bagi penurunan angka produksi pertanian, kerugian yang dialami petani tetapi juga secara lebih luas dapat mengakibatkan kerawanan pangan maka pada tahun 2023, Dinas Pertanian dan Pangan mengambil langkah cepat dengan membentuk Unit Reaksi Cepat Tim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kabupaten Badung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani, sehingga serangan hama penyakit tanaman dapat tertangani dengan cepat dan tuntas.

Tidak hanya itu, dalam mendukung fungsi dan tugas Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) melalui Unit Reaksi Cepat juga didukung dengan sarana seperti Mobil URC, Drone Pertanian dan Obat-obatan.

Mobil URC dan drone pertanian ini merupakan pengadaan Tahun 2023 yang bertujuan tidak hanya mempercepat proses pengendalian hama dan penyakit tumbuhan tetapi sekaligus memberikan pengenalan kepada petani terhadap penerapan teknologi pertanian multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas pertanian seperti penyemaian, penyebaran pupuk sehingga dapat menghasilkan produk pertanian secara lebih efektif dan efisien.



12. Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian

Tahun 2023 pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pertanian dan Pangan berkomitmen melakukan perbaikan terhadap beberapa infastruktur dan sarana pengembangan pertanian berupa bantuan maupun subsidi. Bantuan prasarana pertanian yang diberikan Tahun 2023 yakni sebanyak 7 (tujuh) unit yang bersumber dari APBN dan APBD. Bantuan tersebut berupa Jalan Usaha Tani



yang bersumber dari APBN sebanyak 2 unit, Jaringan Irigasi Tersier sebanyak 2 unit yang bersumber dari APBN dan 3 unit jalan usaha tani yang dananya bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

- Jalan Usaha Tani di Subak Karang Dalem
- Jalan Usaha Tani di Subak Ayung
- Jalan Usaha Tani di Subak Latu
- Jalan Usaha Tani di Subak Uma Bun
- Jalan Usaha Tani di Subak Taman
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Subak Selasih dan Subak Tanah Yeng



Pemberian bantuan sarana pertanian yang dilaksanakan selama Tahun 2023 berupa penyerahan benih/bibit , subsidi benih dan asuransi serta penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian. Total sarana berupa alat dan mesin pertanian yang keseluruhan dananya digelontorkan dari APBD Kabupaten Badung adalah sebanyak 28 Unit.



Adapun bantuan bibit pohon sampai dengan tahun 2023 yang telah disalurkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut :Tanaman hortikultura sebanyak 1.290.000 pohon

- Alpukat sebanyak 1.189 pohon
- Kelapa genjah 5000 pohon
- Manggis 150.000 pohon
- Mangga 100.000 pohon
- Durian 6.600 pohon
- Tanaman bunga sebanyak 625.100 pohon



13. Masyarakat Tanam Cabe

selain mengembangkan tanaman cabai rawit di kawasan/ areal sawah , guna mengantisipasi dampak inflasi khususnya gejala harga cabai dan dampak perubahan iklim global serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, Dinas Pertanian dan pangan turut melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dengan memberikan bibit cabai kepada masyarakat dan sarana pengembangannya serta sosialisasi teknik budidaya cabai di lahan pekarangan.



Awal peluncuran program Matanabe merupakan program CSR kerjasama Dinas Pertanian dan Pangan Badung dengan Bank BPD Bali, dalam rangka menjaga ketahanan pangan keluarga di tengah pandemi Covid-19, tetapi di Tahun 2023 dana kegiatan ini murni bersumber dari APBD Kabupaten Badung. Tahun 2023 kegiatan Matanabe dilaksanakan di Br. Aseman Kangin desa tibubeneng kuta utara dan Br.Tambyak desa pecatu kuta selatan

14. Siswa Belajar Bertani (SIBERTANI)

Salah satu strategi menarik minat para petani muda ialah mengenalkan teknik budidaya pertanian pada siswa-siswi sekolah. Dengan menumbuhkan minat budidaya pertanian pada siswa-siswi, diharapkan akan semakin bertambahnya jumlah petani muda di Kabupaten Badung yang tentunya berdampak pada penambahan tenaga kerja dan produksi pertanian.

Tahun 2023, sibertani ini didanai dari APBD Kabupaten Badung dan dilaksanakan di 6 (enam) sekolah yaitu :

- SMP 2 Kuta Selatan
- SMP 4 Kuta Selatan
- SMP 5 Kuta Selatan
- SMP Ngurah Rai Kuta Selatan
- SMP 1 Kuta Utara
- SMP 4 Kuta Utara



15. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petani melalui Pelatihan

Pada tahun 2023, Dinas Pertanian dan Pangan memberikan pelatihan kepada pekahe subak terkait intensifikasi tanaman perkebunan dan optimalisasi produksi tanaman pangan



16. Pelaksanaan Kegiatan Survei Ubinan dan Rapat Subron

Kegiatan Ubinan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang produksi pada tanaman pangan yang akurat dan menggambarkan kondisi luas lahan dan indeks pertanaman terkini dengan cara menimbang hasil (kg/ubinan) dan dilakukan wawancara dengan penggarap atau pemilik lahan untuk mengumpulkan data valid yang berkaitan dengan produktivitas. Setelah mendapatkan data ubinan kemudian data tersebut akan dibahas dalam rapat rutin subron, guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Badung. Kegiatan ini sangat penting dilakukan guna mengambil kebijakan terkait pengembangan tanaman pangan selanjutnya, sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman.

Strategi di Bidang peternakan dan kesehatan hewan juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi daging dan telur yakni :

1. Adanya pelaksanaan kegiatan pelatihan terkait inseminasi buatan khusus ternak sapi dan babi
2. Pengawasan peredaran pakan ternak (pengiriman sampel pakan ternak)
3. Kegiatan vaksinasi PMK bagi hewan ternak
Kegiatan vaksinasi kepada hewan ternak ini menyasar hewan ternak tidak hanya sapi melainkan ternak babi. Vaksinasi pada ternak sapi dan babi penting untuk dilakukan karena merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan yang rentan PMK.
4. Vaksinasi SE untuk sapi
5. Melakukan spraying dikandang/tempat pemeliharaan babi, ayam, dan sapi
6. Kegiatan ante dan post mortem hewan/ternak dalam rangka keamanan Bahan Asal Hewan untuk dapat menjaga mutu dan kualitas daging /ASUH (aman, sehat utuh dan halal)
7. Kegiatan penerapan hygiene sanitasi usaha produk hewan dalam rangka penerbitan rekomendasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)



Sasaran 2 : Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | % CAPAIAN |
|----|--------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 2 | Optimalisasi Pemanfaatan Lahan | Indek Pertanaman (IP) | 2,082 | 2,13 | 102,3% |

Optimalisasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usahatani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dapat diukur melalui indeks pertanaman. **Indeks Pertanaman (IP)** merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang ada untuk ditanami.

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Indikator Kinerja Indeks Pertanaman Tahun 2023 adalah sebesar 2,13 dari target 2,082 atau terealisasi sebesar 102,3 %.

Indeks Pertanaman Kabupaten Badung per Kecamatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Diagram dibawah ini :



Dari diagram diatas bahwa, dari 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara memiliki indeks pertanaman tertinggi di Tahun 2023 dan Kecamatan Kuta Selatan merupakan kecamatan yang tidak memiliki indeks pertanaman, karena tidak terdapat lahan pertanian di wilayah tersebut. Terjadi penurunan angka indeks pertanaman di Kecamatan Mengwi dan Petang. Ini salah satunya disebabkan karena terjadinya bencana alam yang mengakibatkan rusaknya prasarana pertanian di subak Penarungan Kecamatan Mengwi yang berujung pada terjadinya gagal panen dan tunda tanam.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 setiap Tahun

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
|----|-------------------------|------------|------------|
| 1 | Indek Pertanaman (IP) | 2,22 | 2,13 |

Turunnya indeks pertanaman Tahun 2023 disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Terjadinya El nino yang mengakibatkan musim kemarau berkepanjangan sehingga mengganggu musim tanam dan sangat berpengaruh terhadap produksi pangan 2023.
2. Terjadinya bencana alam jebolnya terowongan irigasi yang berdampak terhadap 260 hektar lahan sawah mengalami gagal panen.
3. Maraknya alih fungsi lahan persawahan menjadi non persawahan seperti perumahan, vila, hotel dan restoran.
4. Perbaikan jaringan irigasi yang mengakibatkan tertundanya masa tanam
5. Menurunnya kualitas dan debit air.
6. Menurunnya tingkat kesuburan tanah yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman.
7. Banyaknya lahan sawah dengan status bera atau tidak dimanfaatkan karena tingginya biaya produksi untuk beralih komoditas

Untuk mencapai IP yang maksimal perlu memperhatikan beberapa aspek antara lain sosial budaya, ketersediaan air, ketersediaan alsintan, jenis komoditas, dan ketersediaan modal-sarana produksi, tersedia tenaga kerja pada saat tanam dan panen, serta sarana pertanian untuk mengolah tanah, sehingga setiap kegiatan pengolahan lahan dapat diselesaikan lebih cepat.

Meskipun terjadi penurunan IP, tetapi pada tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan tetap dapat melampaui target IP. Ini disebabkan karena berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan untuk meningkatkan indeks pertanaman di Tahun 2023, antara lain:

1. Memberikan sosialisasi kepada petani Subak terkait optimalisasi penggunaan lahan pertanian dengan pola tanam sesuai komoditas. Pola tanam merupakan usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu. Sehingga kegiatan ini dapat secara efektif meningkatkan kesuburan tanah (optimalisasi lahan)
2. Melakukan pendampingan oleh penyuluh pertanian dalam hal pengaturan masa tanam agar lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian

Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian sangat berpengaruh terhadap indeks pertanaman melalui kegiatan pemberian bantuan subsidi benih, bantuan alat dan mesin pertanian, perlindungan asuransi, bantuan pupuk dan pestisida, pengendalian hama dan penyakit, serta perawatan jaringan irigasi.



Sasaran 3 : Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan. Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama :

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | % CAPAIAN |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 3 | Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan | a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 95,98 | 95,97 | 99,99% |

Skor Pola Pangan Harapan merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk.

Berdasarkan data survei skor PPH secara mandiri dan bekerjasama dengan akademisi, maka didapatkan perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Badung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 Skor PPH Kabupaten Badung Sebesar 91,2 dan Pada Tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 95,97, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Analisa Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Makanan Penduduk
Kabupaten Badung Tahun 2023

| No | Kelompok Bahan Makanan | Deskripsi Konsumsi | | | Pola Pangan Harapan | |
|----|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------|
| | | % AKE | Bobot Kelompok Pangan | Skor AKE | Skor Standar | Skor nyata |
| 1 | Padi-padian | 59,21 | 0,5 | 29,66 | 25 | 25 |
| 2 | Umbi-umbian | 2,03 | 0,5 | 1,1 | 2,5 | 1,1 |
| 3 | Pangan Hewani | 15,20 | 2 | 30,40 | 24 | 24 |
| 4 | Minyak dan Lemak | 9,73 | 0,5 | 4,86 | 5 | 4,86 |
| 5 | Buah dan Biji Berminyak | 2,43 | 0,5 | 1,22 | 1 | 1 |
| 6 | Kacang-kacangan | 3,959 | 2 | 7,91 | 10 | 7,91 |
| 7 | Gula | 4,37 | 0,5 | 2,19 | 2,5 | 2,19 |
| 8 | Sayuran dan buah-buahan | 6,07 | 5,0 | 30,35 | 30 | 30,00 |
| | Jumlah | 102,12 | | | | 95,97 |

Sumber: Bidang Pangan dan Penyuluhan (2023)

Kenaikan Skor PPH yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan karena adanya peningkatan pola konsumsi pangan yaitu pada konsumsi umbian-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah dan juga disebabkan karena menurunkan konsumsi kelompok padi-padian.

Sedangkan perbandingan skor pola pangan harapan dari Tahun 2022 dan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 setiap Tahun

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
|----|--------------------------------|------------|------------|
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 91,2 | 95,97 |

Meningkatnya skor pola pangan harapan di Tahun 2023 menunjukkan konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Badung sudah menuju komposisi yang beragam, bergizi dan seimbang. Capaian ini merupakan akumulasi upaya Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan program kegiatan yang efektif untuk mendukung peningkatan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Badung seperti :

1. Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal

Setiap tahun Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung melaksanakan pelatihan pengolahan pangan lokal bagi Kelompok Wanita Tani yang bertujuan untuk mendorong penganekaragaman konsumsi pangan lokal rumah tangga. Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning dikembangkan menjadi tepung. Kedepan diharapkan aneka tepung ini dapat diolah sebagai pangan pokok pengganti beras.

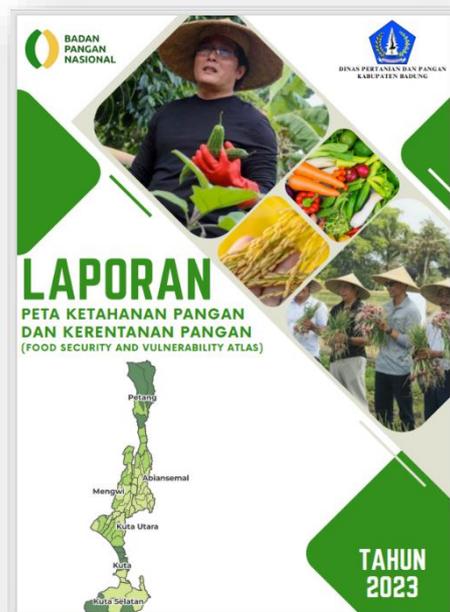


2. Gerakan Pangan Murah

Guna menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan menjelang Hari Besar Keagamaan maka pada Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah bersumber dari APBN dan APBD. Pelaksanaan GPM Kabupaten Badung menggandeng Perum BULOG dan Gapoktan, serta pelaku usaha setempat lainnya menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok untuk dijual dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar. Sejumlah komoditas tersebut meliputi, beras, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, gula, minyak goreng, serta aneka sayuran dan buah-buahan (tambah foto masyarakat belanja)



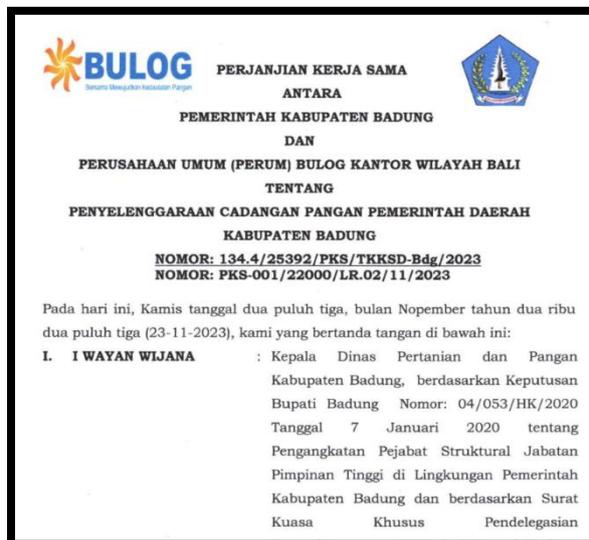
3. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan



Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengukur dan memitigasi kerawanan pangan di Kabupaten Badung. Ketersediaan FSVA dan juga Skor PPH merupakan bagian dari upaya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam melakukan inovasi dan transformasi penyediaan data dan informasi. Hasil FSVA dan capaian Skor PPH kepada seluruh pihak serta stakeholders pangan terkait, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan dalam upaya membangun sistem pangan nasional yang adaptif, tangguh dan berkelanjutan.

4. Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah

Keberadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya di tengah kejadian bencana ataupun terjadi gejolak harga pasar yang cukup tinggi di Kabupaten badung. Dengan memiliki CPPD, pada kondisi bencana dan darurat Pemerintah daerah dapat secara cepat melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak. Langkah ini lebih mudah dibandingkan menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat, karena harus ada penetapan status keadaan darurat atau kerawanan pangan pasca bencana terlebih dahulu. Tahun 2022 Kabupaten Badung belum memiliki cadangan pangan sedangkan Tahun 2023 Kabupaten telah dilaksanakan kerjasama dengan Perusahaan Umum Bulog terkait penyediaan cadangan pangan beras sebanyak 140 Ton.



Sasaran 4 : Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian. Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama :

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | % CAPAIAN |
|----|---|-------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 4 | Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian | Indeks RB | 24,96 | 24,94 | 99,91 % |

Mulai Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Badung tidak lagi melaksanakan evaluasi mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bagi perangkat daerah, sehingga capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2023 tidak bisa direalisasikan dan masih menggunakan indeks RB Tahun 2022 yaitu 24,94 dari target capaian nilai 24,96 (Tercapai 99,91%) dengan hasil sebagai berikut :

- a. Aspek pemenuhan memperoleh nilai 9,66% dari bobot yang ditetapkan 14,60%
- b. Aspek reform memperoleh nilai 15,28% dari bobot yang ditetapkan sebesar 21,70%

Salah satu wujud keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mengingat Tahun 2023 tidak dilakukan evaluasi indeks RB maka nilai LKJIP dapat dijadikan salah satu indikator pelaksanaan RB. Berdasarkan hasil evaluasi LKJIP oleh Inspektorat, nilai LKJIP Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 adalah sebesar

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan pelaporan kinerja tahun berikutnya kami akan mengusulkan dilakukannya revisi terhadap indikator sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026.

Untuk dapat memenuhi target yang diharapkan perlu disusun program yang efektif untuk mendukung peningkatan indeks reformasi birokrasi , salah satunya dengan mendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan berbasis elektronik secara lebih efektif di Tahun berikutnya, upaya tersebut sudah dilakukan, dengan merancang sistem “aplikasi Bang Goni” bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Badung dan merancang sistem aplikasi “Sampi Digital” bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.



Badung Go Tani



3.3 Aspek Keuangan

Untuk Merealisasikan dan mencapai target-target sasaran melalui pencapaian target indikator kinerja utama menggunakan dana dengan gambaran sebagai berikut :

| KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG | INDIKATOR | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|------|----|----|------|----|---|---|----------------------|----------------------|---------|
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | 7.668.608.513 | 6.402.214.419 | 83,49 |
| 2 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 7.633.473.054 | 6.378.205.469 | 83,56 |
| 2 | 09 | 03 | 2,01 | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Produksi Beras | 4.604.412.344 | 3.783.239.859 | 82,17 |
| 2 | 09 | 03 | 2,01 | 01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 1.207.227.650 | 803.304.020 | 66,54 |
| 2 | 09 | 03 | 2,01 | 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | 3.397.184.694 | 2.979.935.839 | 87,72 |
| 2 | 09 | 03 | 2,02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase Cadangan Pangan yang dikelola dengan baik | 1.708.000.000 | 1.609.720.000 | 94,25 |
| 2 | 09 | 03 | 2,02 | 03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 1.708.000.000 | 1.609.720.000 | 94,25 |
| 2 | 09 | 03 | 2,04 | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun | 1.321.060.710 | 985.245.610 | 74,58 |
| 2 | 09 | 03 | 2,04 | 02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1.321.060.710 | 985.245.610 | 74,58 |
| 2 | 09 | 04 | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase (%) Desa Tahan Pangan | 11.371.075 | 2.861.400 | 25,16 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-----------------------|-----------------------|-------|
| 2 | 09 | 04 | 2,01 | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan | 5.815.590 | 2.861.400 | 49,20 |
| 2 | 09 | 04 | 2,01 | 01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan | 5.815.590 | 2.861.400 | 49,20 |
| 2 | 09 | 04 | 2,02 | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan | 5.555.485 | 0 | 0,00 |
| 2 | 09 | 04 | 2,02 | 02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5.555.485 | 0 | 0,00 |
| 2 | 09 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT) | 23.764.384 | 21.147.550 | 88,99 |
| 2 | 09 | 05 | 2,01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | 23.764.384 | 21.147.550 | 88,99 |
| 2 | 09 | 05 | 2,01 | 02 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 15.606.720 | 13.494.550 | 86,47 |
| 2 | 09 | 05 | 2,01 | 03 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 23.253.000 | 7.653.000 | 32,91 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | 80.405.201.644 | 67.538.313.007 | 84,00 |
| 3 | 27 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LKjIP | 46.612.089.262 | 38.678.747.219 | 82,98 |
| 3 | 27 | 01 | 2,01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersusun tepat waktu | 13.544.200 | 11.925.110 | 88,05 |
| 3 | 27 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.292.383 | 5.961.610 | 94,74 |
| 3 | 27 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.251.817 | 5.963.500 | 82,23 |
| 3 | 27 | 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu | 39.126.078.857 | 31.852.827.768 | 81,41 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|----------------------|----------------------|--------|
| 3 | 27 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pertanian dan Pangan) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 39.126.078.857 | 31.852.827.768 | 81,41 |
| 3 | 27 | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu</i> | 8.074.254 | 7.758.418 | 96,09 |
| 3 | 27 | 01 | 2,05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Pertanian dan Pangan) | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5.856.918 | 5.699.000 | 97,30 |
| 3 | 27 | 01 | 2,05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pertanian dan Pangan) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2.217.336 | 2.059.418 | 92,88 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu</i> | 966.835.101 | 824.593.500 | 85,29 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pertanian dan Pangan) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 24.500.000 | 24.455.000 | 99,82 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pertanian dan Pangan) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 95.435.794 | 24.630.000 | 25,81 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pertanian dan Pangan) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 34.171.273 | 24.012.000 | 70,27 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 724.265.947 | 663.988.000 | 91,68 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 21.442.087 | 20.488.500 | 95,55 |
| 3 | 27 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 67.020.000 | 67.020.000 | 100,00 |
| 3 | 27 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 3.589.636.386 | 3.423.862.692 | 95,38 |
| 3 | 27 | 01 | 2,07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 291.930.000 | 291.500.000 | 99,85 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|---|--|-----------------------|-----------------------|--------|
| 3 | 27 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2.510.753.379 | 2.396.062.000 | 95,43 |
| 3 | 27 | 01 | 2,07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 786.953.007 | 736.300.692 | 93,56 |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu | 1.489.189.791 | 1.321.147.714 | 88,72 |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12.000.000 | 12.000.000 | 100,00 |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 604.913.679 | 474.224.458 | 78,40 |
| 3 | 27 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 872.276.112 | 834.923.256 | 95,72 |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik | 1.418.730.673 | 1.236.632.017 | 87,16 |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1.175.353.941 | 1.004.560.220 | 85,47 |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 118.996.732 | 109.251.435 | 91,81 |
| 3 | 27 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 124.380.000 | 122.820.362 | 98,75 |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor) | 18.309.211.929 | 15.892.573.785 | 86,80 |
| 3 | 27 | 02 | 2,01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis) | 13.369.337.493 | 11.484.491.475 | 85,90 |
| 3 | 27 | 02 | 2,01 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 9.421.019.605 | 8.458.756.368 | 89,79 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|----------------------|----------------------|-------|
| 3 | 27 | 02 | 2,01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 3.948.317.888 | 3.025.735.107 | 76,63 |
| 3 | 27 | 02 | 2,02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi) | 460.359.942 | 456.574.824 | 99,18 |
| 3 | 27 | 02 | 2,02 | 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 407.007.189 | 406.422.024 | 99,86 |
| 3 | 27 | 02 | 2,02 | 03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 53.352.753 | 50.152.800 | 94,00 |
| 3 | 27 | 02 | 2,03 | | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu | 32.158.591 | 29.837.000 | 92,78 |
| 3 | 27 | 02 | 2,03 | 02 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | 32.158.591 | 29.837.000 | 92,78 |
| 3 | 27 | 02 | 2,04 | | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi | 1.355.529 | 1.072.000 | 79,08 |
| 3 | 27 | 02 | 2,04 | 01 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | 1.355.529 | 1.072.000 | 79,08 |
| 3 | 27 | 02 | 2,05 | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan | 15.809.337 | 14.884.900 | 94,15 |
| 3 | 27 | 02 | 2,05 | 06 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | 15.809.337 | 14.884.900 | 94,15 |
| 3 | 27 | 02 | 2,06 | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas | 4.430.191.037 | 3.905.713.586 | 88,16 |
| 3 | 27 | 02 | 2,06 | 01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 4.430.191.037 | 3.905.713.586 | 88,16 |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Luas Tanam Padi | 6.919.240.210 | 6.018.425.836 | 86,98 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|----------------------|----------------------|-------|
| 3 | 27 | 03 | 2,01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian | 86.581.446 | 56.802.346 | 65,61 |
| 3 | 27 | 03 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 86.581.446 | 56.802.346 | 65,61 |
| 3 | 27 | 03 | 2,02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun | 3.482.144.699 | 2.761.659.028 | 79,31 |
| 3 | 27 | 03 | 2,02 | 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 3.482.144.699 | 2.761.659.028 | 79,31 |
| 3 | 27 | 03 | 2,03 | | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah sumber bibit Ternak yang dikelola dengan baik | 3.350.514.065 | 3.199.964.462 | 95,51 |
| 3 | 27 | 03 | 2,03 | 01 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | 3.350.514.065 | 3.199.964.462 | 95,51 |
| 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan | 4.691.787.269 | 3.332.473.562 | 71,03 |
| 3 | 27 | 04 | 2,01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan | 4.113.895.962 | 2.894.586.722 | 70,36 |
| 3 | 27 | 04 | 2,01 | 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 4.113.895.962 | 2.894.586.722 | 70,36 |
| 3 | 27 | 04 | 2,03 | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa | 346.506.554 | 238.640.246 | 68,87 |
| 3 | 27 | 04 | 2,03 | 02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 346.506.554 | 238.640.246 | 68,87 |
| 3 | 27 | 04 | 2,04 | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi | 231.384.753 | 199.246.594 | 86,11 |
| 3 | 27 | 04 | 2,04 | 02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 44.070.588 | 30.898.000 | 70,11 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|----------------------|----------------------|-------|
| 3 | 27 | 04 | | 03 | Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis | Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan | 122.615.833 | 113.398.234 | 92,48 |
| 3 | 27 | 04 | 2,04 | 04 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | 64.698.332 | 54.950.360 | 84,93 |
| 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | % Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi | 1.326.633.037 | 1.167.987.142 | 88,04 |
| 3 | 27 | 05 | 2,01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi | 1.326.633.037 | 1.167.987.142 | 88,04 |
| 3 | 27 | 05 | 2,01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 141.966.653 | 141.502.080 | 99,67 |
| 3 | 27 | 05 | 2,01 | 03 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 1.184.666.384 | 1.026.485.062 | 86,65 |
| 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan | 2.546.239.937 | 2.448.105.463 | 96,15 |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani | 2.546.239.937 | 2.448.105.463 | 96,15 |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1.271.805.017 | 1.219.853.391 | 95,92 |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 249.166.684 | 207.516.428 | 83,28 |
| 3 | 27 | 07 | 2,01 | 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 1.025.268.236 | 1.020.735.644 | 99,56 |

Dari gambaran aspek keuangan diatas , terdapat sub kegiatan dengan nilai realisasi keuangan yang masih rendah (dibawah 75%) :

1. Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
4. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pertanian dan Pangan)
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
9. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
10. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Dari sepuluh sub kegiatan yang serapannya dibawah 75% tersebut disebabkan karena alasan sebagai berikut :

1. Sebagian besar dikarenakan efisiensi pada proses pengadaan barang/jasa
2. Pada Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan terdapat belanja yang memang sudah didanai dari APBN sehingga dana pada APBD tidak dapat terserap
3. Pada sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tidak terealisasi karena di Tahun 2023 tidak terdapat daerah di Kabupaten Badung yang ditetapkan sebagai daerah rawan pangan
4. Pada Sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis , terdapat pengadaan barang dalam negeri yang harganya jauh dari standar harga dalam dokumen anggaran.

3.4 Prestasi Yang Diraih

Prestasi yang diraih selama tahun 2022-2023 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung antara lain :

1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 sebagai Badan Publik Informatif
2. BPP Berprestasi Peringkat II (Kedua Tingkat Provinsi Bali Tahun 2022
3. Kabupaten dengan Indeks Ketahanan Pangan Terbaik II Tahun 2022
4. Top 15 Inovasi Pelayanan Publik “Asparagus ditanam ekonomi mapan” Tahun 2023
5. Anugerah Mangupura Award peringkat VI Tahun 2023
6. Peringkat VII Pelayanan Publik Terbaik di Kabupaten Badung
7. BPP Petang Peringkat I Tingkat Provinsi Bali Tahun 2023





4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun sebagai jabaran visi dan misi kepala daerah serta strategi OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 4 (Empat) indikator.

BAB IV **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dari bab-bab tersebut diatas , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengingat berbagai tantangan yang disebabkan oleh faktor alam , seperti dampak el nino, serangan hama penyakit dan bencana alam, dari 4 (Empat) indikator kinerja, 2 (dua) indikator telah melampaui target dan 2(Dua) indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Presentase Peningkatan Produksi Pangan Strategis tercapai 113,3%
 - b. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan tercapai 102,3%
 - c. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan tercapai 99,99%
 - d. Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian tercapai 99,91 %
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka skala nilai peringkat kinerja berdasarkan capaian 4 (empat) indikator sasaran tergolong dalam kategori tinggi.
3. Tidak tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor eksternal :
 - Perubahan dan variabilitas iklim yang terjadi secara global yaitu terjadinya el nino. El nino merupakan perubahan iklim global yang berdampak di seluruh Indonesia tidak hanya di Kabupaten Badung yang mengakibatkan curah hujan menurun / musim kemarau yang berkepanjangan dan ini sangat berpengaruh terhadap produksi pangan 2023 dan 2024.
 - Terjadinya alih fungsi lahan
 - Perbaikan prasarana pertanian yang mengakibatkan tertundanya masa tanam
 - Menurunnya ketersediaan air
4. Tidak tercapainya indikator sasaran indeks reformasi birokrasi disebabkan karena pada tahun 2023 inspektorat Kabupaten Badung tidak melaksanakan evaluasi mandiri sehingga dalam pelaporan ini masih menggunakan hasil evaluasi tahun 2022 dan Nilai LKJIP sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi



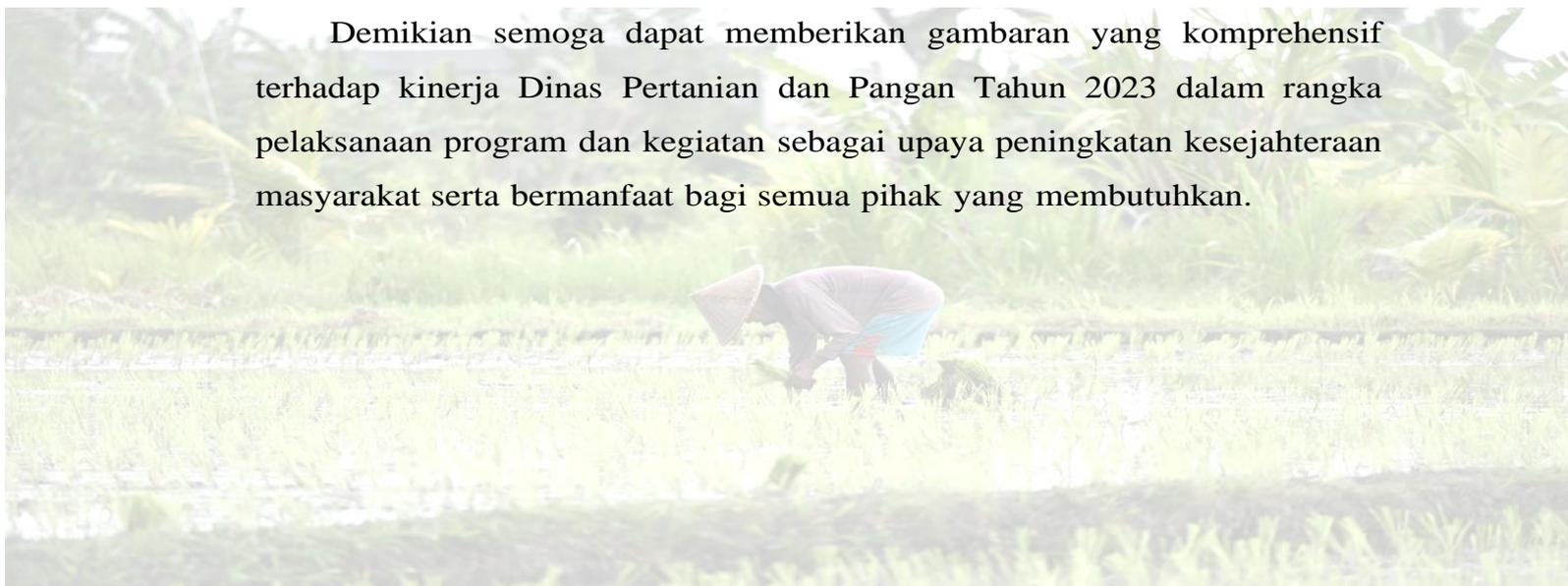
4.2 Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan kinerja kedepan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga bisa dilakukan antisipasi apabila terjadi perubahan cuaca yang ekstrem maupun perbaikan saluran irigasi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman.
2. Melakukan penyempurnaan terhadap pohon kinerja sehingga dapat dirumuskan sasaran kinerja yang seharusnya dicapai dan didukung dengan program/kegiatan yang benar-benar dapat mencapai output dan outcome yang mendukung pencapaian target kinerja.
3. Menjalinkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan dana CSR.
4. Merintis kerjasama dengan berbagai organisasi untuk memperluas akses pemasaran.
5. Merancang berbagai program terobosan / inovasi khususnya dengan memanfaatkan sistem informasi/elektronik
6. Mengusulkan dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian semoga dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



4.3 Program Inovasi

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Salah satu upaya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan mengembangkan program-program inovasi sesuai dengan kewenangan yaitu :

1. Inovasi MATANABE (Masyarakat Tanam Cabe) , Antisipasi kenaikan harga cabai
2. Inovasi sistem aplikasi Bang GoNi (Badung Go Tani)
3. Inovasi BANG ROMI (Badung Promo Tani)
4. Inovasi Mangupura Vet Klinik
5. Inovasi SIBERTANI (Siswa Belajar Bertani)
6. SIDUTA (Siswa Edu Wisata)
7. Inovasi TAK GIGIT HABIS (Tata Laksana Gigitan Hewan Rabies)
8. Inovasi Si-Traktor (Sistem Informasi Dan Tatalaksana Rekomendasi Solar Untuk Traktor)
9. Inovasi SAMPI Digital

Mangupura, 26 Februari 2024
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung,



Dr. I Wayan Wijana S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198812 1 001